



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PEMBATALAN REGISTRASI PERKARA
Nomor xx-xx-xx/APRP-DPR-DPRD/PAN.MK/.../2019**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **dua ribu sembilan belas** pukul ... WIB, kami Panitera atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi:

**MEMBATALKAN REGISTRASI PERMOHONAN
NOMOR ...-...-.../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019**

Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 diajukan oleh:

Partai ... untuk Provinsi Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... 2019 memberi kuasa kepada ... dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan pembatalan ini mengakibatkan permohonan dimaksud tidak dapat diajukan kembali.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.